



Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir Di Kabupaten Bandung Tahun 2022

Mohamad Rafi Surya Balebat¹⁾, Ivan Darmawan²⁾, Rudiana³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia

mohamad20010@mail.unpad.ac.id¹⁾

ivan.darmawan@unpad.ac.id²⁾

rudiana2017@unpad.ac.id³⁾

Abstrak

Pada tahun 2022, Kabupaten Bandung tergolong wilayah berisiko tinggi bencana berdasarkan indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Banjir menjadi bencana dengan dampak terbesar, dengan 47.141 korban terdampak dari total 49.819 korban bencana di Kabupaten Bandung. Pengurangan risiko bencana menjadi pendekatan yang penting dalam strategi pemerintah daerah, namun fokus masih lebih banyak pada pembangunan infrastruktur fisik daripada sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko banjir. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengurangi risiko bencana banjir menggunakan teori Mark Moore yang meliputi Public Value, Authorizing Environment, dan Operational Capacity. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk mengkaji fenomena ini melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah sudah berjalan secara normatif dan preventif melalui regulasi dan program terkait. Namun, partisipasi masyarakat yang rendah serta keterbatasan kapasitas OPD menyebabkan program kurang optimal dan tidak memberikan dampak signifikan. Peningkatan partisipasi masyarakat dan efisiensi sumber daya perlu menjadi fokus dalam strategi ke depan.

Kata kunci: Banjir, Kapasitas Operasional, Pengurangan Risiko Bencana, Partisipasi Masyarakat, Strategi Pemerintah.

Abstract

In 2022, Bandung Regency was classified as a high-risk disaster area according to the Indonesian Disaster Risk Index (IRBI) issued by the National Disaster Management Agency. Flooding was the most impactful disaster, affecting 47,141 victims out of a total of 49,819 disaster victims in Bandung Regency. Disaster risk reduction has become a crucial approach in the local government's strategy, but the focus remains on physical infrastructure rather than community empowerment, awareness, and river basin management (DAS). Limited human resources also hinder the government's efforts to reduce and manage flood risks. This research aims to analyze the Bandung Regency government's strategy in flood disaster risk reduction using Mark Moore's theory, which includes Public Value, Authorizing Environment, and Operational Capacity. A descriptive qualitative approach was employed to examine this phenomenon through interviews, observations, and literature reviews. The findings reveal that the government has implemented both normative and preventive strategies through regulations and related programs. However, low public participation and the limited capacity of local government agencies (OPD) have resulted in suboptimal programs that have yet to yield significant impacts. Increasing community participation and improving resource efficiency must become a priority in future strategies to enhance disaster risk reduction efforts.

Key words: Disaster Risk Reduction, Flood, Government Strategy, Operational Capacity, Public Participation

PENDAHULUAN

Penelitian ini berangkat dari kondisi geografis Kabupaten Bandung, yang sering dilanda bencana banjir akibat lokasinya yang berada di cekungan serta dilintasi oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) besar seperti Citarum, Cisangkuy, dan Cikapundung (Tuharyati et al., 2023). Hal ini membuat Kabupaten Bandung menjadi wilayah dengan risiko bencana yang tinggi. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2022, Kabupaten Bandung menempati peringkat 186 dari 514 wilayah di Indonesia, dengan skor 14,594 yang menempatkannya dalam kategori risiko tinggi. Tingkat curah hujan yang tinggi, dikombinasikan dengan buruknya pengelolaan DAS dan alih fungsi lahan hijau, menjadi faktor utama terjadinya banjir yang berulang di wilayah ini. Laporan tahunan BPBD Kabupaten Bandung mencatat sebanyak 93 kejadian banjir selama tahun 2022, dengan dampak pada 47.141 jiwa dari total 49.819 korban bencana. Melihat dampak besar dari banjir, Pemerintah Kabupaten Bandung telah mencoba menerapkan strategi pengurangan risiko bencana dengan membangun infrastruktur seperti kolam retensi dan polder, namun pendekatan ini masih dinilai kurang optimal. Kurangnya partisipasi masyarakat serta keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan utama dalam upaya pengurangan risiko bencana (Asrofi & Syaichoni, 2022).

Penelitian terdahulu mengenai strategi pengurangan risiko bencana, khususnya pada tema bencana alam seperti banjir, telah dilakukan dengan berbagai pendekatan. Beberapa kajian signifikan menunjukkan bahwa pemerintah sering kali lebih fokus pada pembangunan infrastruktur fisik ketimbang pendekatan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana. Salah satu kajian penting dilakukan oleh Faisal Ahmad, yang meneliti manajemen bencana di Sukabumi (Marlyono, 2016). Penelitiannya menekankan bahwa tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan sering kali diabaikan, sementara respons dan pemulihan pascabencana sudah lebih baik karena adanya sinergi antar lembaga. Namun, penelitian ini belum memberikan solusi signifikan pada aspek mitigasi berbasis komunitas yang berkelanjutan. Penelitian oleh Rimba Millega di Bogor menggunakan teori Mark Moore yang menilai strategi pemerintah berdasarkan tiga komponen: *public value*, *authorizing environment*, dan *operational capacity*. Riset ini menemukan bahwa ada kelemahan implementasi dalam ketiga aspek tersebut, terutama terkait kapasitas operasional yang terbatas, yang juga dihadapi oleh penelitian saat ini di Kabupaten Bandung. Dengan demikian, penelitian ini mengidentifikasi adanya kebutuhan untuk memperbaiki keterlibatan masyarakat dan peningkatan kapasitas internal pemerintah dalam pengurangan risiko bencana banjir, sebagaimana yang juga direkomendasikan oleh berbagai studi sebelumnya. Penelitian sebelumnya tentang pengurangan risiko bencana, khususnya pada bencana banjir, umumnya berfokus pada pendekatan fisik, seperti pembangunan infrastruktur, dan belum banyak yang mengutamakan aspek pemberdayaan masyarakat atau kolaborasi antara pemerintah dan warga. Penelitian ini mengidentifikasi gap utama berupa kurangnya fokus pada *Public Value* dan *Authorizing Environment*, yang dalam penelitian lain sering diabaikan. Sebagian besar kajian terdahulu, seperti penelitian di Sukabumi dan Bogor, menyoroti kelemahan pada aspek kapasitas operasional pemerintah, tanpa mengeksplorasi bagaimana masyarakat bisa lebih dilibatkan (Isnanto, 2023).

Penelitian ini berangkat dari masalah utama bahwa meskipun pemerintah Kabupaten Bandung telah menjalankan program pengurangan risiko bencana banjir, program tersebut belum berjalan optimal karena keterbatasan SDM dan minimnya keterlibatan masyarakat. Hipotesis utama yang diusulkan adalah: jika pemerintah mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperbaiki kapasitas internalnya, efektivitas strategi pengurangan risiko banjir akan meningkat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori Mark Moore untuk menganalisis strategi pemerintah. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur untuk memetakan permasalahan dan mengevaluasi efektivitas strategi yang sudah diterapkan. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lain guna meningkatkan kesadaran serta partisipasi dalam pengurangan risiko bencana sehingga dari pendekatan tersebut penelitian ini diharapkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai strategi yang diterapkan oleh Pemerintah

Kabupaten Bandung dalam pengurangan risiko bencana banjir. Dengan menganalisis strategi tersebut melalui teori Mark Moore yang melibatkan tiga komponen utama—*Public Value*, *Authorizing Environment*, dan *Operational Capacity*—diharapkan dapat ditemukan solusi untuk perbaikan di masa depan. Harapan lainnya adalah agar penelitian ini memberikan rekomendasi konkrit terkait peningkatan partisipasi masyarakat serta pemanfaatan sumber daya internal pemerintah secara lebih efisien (Moore, 1995).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan strategi pemerintah dalam pengurangan risiko bencana banjir di Kabupaten Bandung (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Desain penelitian ini didasarkan pada teori Mark Moore yang mengevaluasi strategi pemerintah melalui tiga komponen utama: *Public Value*, *Authorizing Environment*, dan *Operational Capacity* (Abdussamad, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan dan strategi pemerintah serta pelaksanaannya dalam mitigasi banjir. Prosedur penelitian melibatkan pengumpulan data dari berbagai informan yang relevan, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, masyarakat terdampak, dan organisasi non-pemerintah terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Populasi penelitian ini mencakup pejabat pemerintah di Kabupaten Bandung yang bertanggung jawab atas kebijakan bencana serta masyarakat yang terdampak banjir. Sampel ditentukan secara purposive, melibatkan informan yang memiliki pemahaman mendalam tentang strategi pengurangan risiko banjir di daerah tersebut. Informan utama termasuk pejabat BPBD, perangkat kecamatan, dan perwakilan masyarakat setempat. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan observasi lapangan untuk menangkap dinamika strategi pengurangan risiko banjir. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi untuk memeriksa arsip, laporan, dan dokumen terkait kebijakan bencana di Kabupaten Bandung. Instrumen penelitian berupa panduan wawancara dan checklist observasi yang disusun berdasarkan kerangka teori Moore. Setiap wawancara dirancang untuk mengeksplorasi tiga komponen utama dalam strategi pengurangan risiko bencana. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif model Miles dan Huberman, yang melibatkan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen kemudian disintesis untuk menemukan pola, mengevaluasi efektivitas strategi, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan (Moore, 1995).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merujuk pada laporan BPBD Kabupaten Bandung, tercatat sebanyak 47.141 jiwa terdampak banjir sepanjang tahun 2022. Secara statistik angka tersebut cukup rendah disbanding tahun sebelumnya yakni 2021, di mana banjir berdampak pada 214.244 jiwa (Mustajab, 2022). Namun, jumlah jiwa terdampak banjir Kembali meningkat hingga 62.600 jiwa pada tahun 2023 (Mubarokah & Aditya, 2022).

Terdapat penurunan frekuensi bencana banjir dari yang sebelumnya berjumlah 111 pada tahun 2021, sedikit mengalami penurunan menjadi 92 kali pada tahun 2022 (Rusfiana & Lestari, 2021). Sementara itu, jika kita lihat dari segi angka korban terdampak (lihat table 4.2) penurunan cukup signifikan dari 214.244 korban terdampak banjir pada tahun 2021, kemudian turun menjadi 47.141 korban pada tahun 2022. Adapun, pada tahun 2022 hingga 2023 jumlah korban terdampak dengan frekuensi bencana secara jelas tidak berbanding lurus. Dimana terdapat 92 kejadian bencana banjir dengan 47.414 korban terdampak pada tahun 2022, sementara pada tahun 2023 tercatat total 61 kejadian bencana banjir dengan korban terdampak sebanyak 62.200 (Isnanto, 2023).

Berdasarkan temuan ini artinya dampak bencana banjir terhadap masyarakat tidak selalu karena faktor frekuensi kejadian bencananya itu sendiri, tetapi juga bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meminimalisir dampak dari bencana itu sendiri (Sitorus et al., 2021).

Demikian, pembahasan dalam riset ini adalah terkait strategi pemerintah daerah dalam upaya pengurangan risiko banjir di Kabupaten Bandung. Riset ini didasarkan pada teori Mark Moore dalam mengukur strategi yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, melalui 3 komponen yakni *Public Value*, *Authorizing Environment*, dan *Operational Capacity* (Herdiana, 2022).

Dalam merumuskan suatu kebijakan, perencanaan, maupun segala strategi yang dijalankan oleh suatu lembaga haruslah berlandaskan suatu nilai publik yang mampu membawa kebermanfaatan bagi khalayak, ketimbang hanya sekedar menjalankan tupoksinya sebagai suatu urusan mandatori (Salam, 2007). Ketercapaian indikator ini dapat dilihat dari sejauh mana setiap lembaga yang menjadi objek penelitian ini berupaya untuk menghasilkan suatu nilai melalui program atau kebijakan yang berangkat dari suatu isu public atau public concern, yang kemudian akan menjadi solusi atas isu tersebut. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.2 Tahun 2013, disebutkan bahwa pada dasarnya penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta khususnya pada Pasal 24 dan 25 dengan isi yang menyimpulkan adanya indikasi bahwasannya masyarakat juga memiliki peran untuk berkoordinasi dengan BPBD tidak terbatas pada organisasi maupun lembaga (Kaho, 2010).

Pada implementasinya Perda tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ridwan, staff Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bandung "Ya pada dasarnya BPBD Kabupaten Bandung memiliki tugas dan fungsi yang utamanya berupaya untuk menanggulangi bencana, baik banjir, longsor, gempa bumi, dan lain lain dapat dilihat dari renstra dan lainnya". Dalam menjalankan tupoksinya BPBD Kabupaten Bandung berupaya untuk berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik Masyarakat, Swasta maupun LSM. Dalam upaya pengurangan risiko bencana menurut Ridwan, BPBD Kabupaten Bandung pada tahun 2022 hingga saat riset ini dilakukan, selalu aktif dalam melaksanakan sosialisasi (Setiadarma, 2024).

Pada tahun 2022 prioritas pembangunan BPBD Kabupaten Bandung diarahkan pada beberapa hal yang dianggap isu strategis dalam upaya pengurangan risiko bencana, beberapa diantaranya yakni Pemetaan Potensi Kawasan rawan bencana berdasarkan cakupan wilayah, jenis bencana dan dampak bencana; Kemandirian dan peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha di dalam upaya pencegahan/kesiapsiagaan (Pra bencana) serta adaptasi terhadap bencana; Peningkatan Kualitas Sistem Manajemen Penanganan Tanggap Darurat di Kabupaten Bandung yang merupakan 3 poin dari 10 poin merupakan bentuk upaya BPBD Kabupaten Bandung dalam menciptakan public value (Laida et al., 2023). Di mana dalam poin meningkatkan kualitas dari sistem manajemen tersebut BPBD berupaya untuk menciptakan sistem manajemen kebencanaan yang lebih baik dengan menyusun RAD (Rencana Aksi Daerah) dan PRB (Peta Rawan Bencana). Kemudian, dalam poin 5 BPBD akan melakukan pemetaan kawasan yang berpotensi rawan terjadi bencana (Sugriwa, 2022). Pemetaan tersebut haruslah dirangkum dalam suatu kajian yang komprehensif seperti dalam poin sembilan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ridwan "Potensi bencana banjir dikaji secara komprehensif oleh BPBD melalui KRB (Kajian Risiko Bencana) yang kemudian akan dituangkan ke dalam rencana kontijensi sebagai pedoman dalam penanggulangan bencana" (Audiah, 2023).

Dalam spektrum keberlanjutan, upaya pengurangan risiko bencana harus mampu menasar masyarakat secara sistematis dengan membangun komunitas-komunitas tanggap bencana. Kemudian salah satu output simposium tersebut adalah terciptanya destana (desa tangguh bencana). Hal tersebut sejalan dengan tujuan Destana itu sendiri yang tercantum dalam Perka BNPB No.12/2012, yakni: Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana; Meningkatkan peran serta masyarakat; khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana; Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana; Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana; Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-

kelompok lainnya yang peduli.

Kemudian upaya pengurangan risiko bencana dalam komponen public value ini dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Bandung No.81 Tahun 2017 Tentang Pembagian Kewenangan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung. Menurut Imran Staff bidang Irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung, upaya pengurangan risiko bencana merupakan salah satu sasaran strategis yang hendak dicapai Kabupaten Bandung dari tahun ke tahun termasuk pada tahun 2022, mengingat kondisi kawasan yang memang menjadi langganan banjir, sehingga diperlukan upaya preventif untuk mengurangi dampak bencana banjir (Sumarna, 2010).

Dalam Perda No.22 Tahun 2022 Tentang “Kesesuaian Pemanfaatan Ruang” upaya memproteksi bangunan dan menjamin tata bangunan yang *sustain* Pemerintah Kabupaten Bandung mengharuskan, seperti dengan mensyaratkan setiap bangunan memiliki PBG (Pedoman Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) (Pratama & Apriani, 2023). Namun menurut Hary, sejauh ini pemenuhan kedua syarat tersebut hanya dijalankan oleh pelaku usaha guna mendapatkan izin usaha, sementara untuk bangunan hunian pribadi cenderung dibangun tanpa menggunakan PBG dan SLF lalu beliau menuturkan “Peraturan yang ada sekarang tidak secara eksplisit mengatur atau mewajibkan adanya PBG dan SLF. Kalau masyarakat lebih melihat kebutuhannya apakah memang perlu PBG atau tidak, karena bagaimana pun banyak masyarakat lokal yang telah tinggal dan menghuni secara turun menurun di Kabupaten Bandung, sehingga urusan bangunan hunian cukup sulit untuk dilakukan verifikasi kelayakannya”.

Bappelitbangda lebih berperan sebagai pendukung dengan berfokus pada kajian, analisis, dan inovasi kewilayahan untuk kebutuhan perencanaan daerah. Di samping perencanaan, Bappelitbangda juga terlibat dalam *monitoring* dan *controlling* berbagai kegiatan OPD, sehingga dapat tetap berjalan *on the track*. Adapun dalam urusan program pengurangan risiko bencana Bappelitbangda sebagai salah satu lembaga Pemerintah Kabupaten Bandung yang memelopori kampanye Mikro DAS. Kegiatan yang diinisiasi oleh Bappelitbangda tersebut dilaksanakan pada Rabu 19 Oktober 2022 dengan dipimpin oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Ekonomi Kabupaten Bandung, Agus Firman Zaini. Kampanye tersebut utamanya berisi seruan bagi seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta dan media untuk bersinergi dalam upaya menjaga dan memperbaiki lingkungan khususnya untuk DAS mikro (Salusu, 1996). Sehingga dari beberapa hasil yang didapatkan di lapangan dapat disimpulkan bahwasannya komponen *public value* terdapat beberapa efek yakni sebagai berikut:

Tabel 1. Komponen *Public Value* dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir

Komponen <i>Public Value</i> dalam pengurangan risiko bencana banjir	
BPBD Kabupaten Bandung	Menjalankan tugas fungsi pokoknya dalam mengurangi risiko bencana sebagaimana yang diatur dalam Perbup No.35 Tahun 2022 - Melakukan upaya preventif dalam meminimalisir dampak korban bencana banjir dengan sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana - Meluncurkan aplikasi TITATU sebagai media informasi kebencanaan daerah - Melakukan sosialisasi Kajian risiko bencana - Membangun PRBBK (Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas) dengan membangun Destana Desa Tangguh Bencana - Karena keterbatasan SDM baik dari segi kapasitas maupun kapabilitas sehingga beberapa program seperti TITATU dan KRB belum rampung di Tahun 2022

DPUTR Kabupaten Bandung	Mengintegrasikan pembangunan berlandaskan pengurangan risiko bencana dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021. - Penyusunan RDTR (Rencana Dasar Tata Ruang) di dua Kecamatan, yakni bojongsong dan . - Mewajibkan pemenuhan PBG (Pedoman Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) dalam pembangunan bangunan gedung di Kabupaten Bandung - Melakukan Pembangunan folder di sebagai resapan air banjir - Sulit melakukan verifikasi kepemilikan SLF pada bangunan gedung hunian masyarakat
Bappelitbangda Kabupaten Bandung	Menjalankan Perencanaan Pembangunan berlandaskan pengurangan risiko sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Bandung No 126 Tahun 2021. - Melakukan analisis dan evaluasi kerja Pemerintah Kabupaten Bandung, yang kemudian berdasarkan hasil analisis tersebut ditentukan prioritas isu kebencanaan sebagai salah satu isu strategis dalam RKPD - Menyusun rancangan teknokratik berdasarkan laporan kerja OPD untuk kemudian dibahas dalam penyusunan RKPD dengan Pemerintah dan Legislatif - Melaksanakan musrenbang tingkat Kabupaten dan Kecamatan dalam membahas berbagai isu dalam perencanaan pembangunan, termasuk urusan kebencanaan - Memprakarsai kampanye mikro DAS untuk mengimbau dan mengundang seluruh pihak terlibat dalam pengelolaan DAS mikro
Pemerintah Kecamatan Dayeuhkolot	- Menjalankan arahan dari Pemerintah Kabupaten Bandung dan berkoordinasi dengan Desa dalam urusan kebencanaan - Melakukan fungsi koordinasi seperti menyebarkan edaran mengenai imbauan kesiapsiagaan bencana banjir - Membentuk dan melatih Linmas sebagai SDM dalam kedaruratan - Memberikan dan menyalurkan bantuan saat dan pasca terjadinya bencana
Masyarakat	- Upaya pemerintah dalam mengurangi banjir sudah baik secara infrastruktur - Sosialisasi dan pendekatan komunitas dalam mengurangi bencana banjir masih belum optimal
FPRB Kabupaten Bandung	- Sudah ada upaya BPBD dalam pengurangan risiko bencana hanya saja berjalan cukup terlambat. - Kajian Risiko Bencana dan AWLR baru diadakan tahun 2023-2024 ini sebelumnya belum ada.

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2024)

Melalui komponen *authorizing environment* penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana legitimasi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam upaya pengurangan risiko bencana. Legitimasi dalam hal ini merupakan pengakuan dari berbagai pihak, sehingga berbagai kebijakan atau program berimplikasi pada dukungan dan partisipasi masyarakat dan stakeholder lain

(Karniawati, 2015). Hal ini bisa diperoleh dari undang-undang atau peraturan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, serta respon atau tanggapan dari penerima layanan terhadap program yang telah berjalan. BPBD Kabupaten Bandung sebagai koordinator utama daerah dalam program pengurangan risiko bencana menyatakan bahwa seluruh program yang dijalankan selama tahun 2022 telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan capaian kinerja berdasarkan renja tahun 2022 (Karunasena et al., 2011).

Berdasarkan pernyataan Ridwan “Sejauh yang saya lihat, seluruh program yang kami jalankan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga tepat sasaran. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah participant yang hadir dalam setiap acara sosialisasi kami selalu memenuhi target. Di sisi lain terdapat index kepuasan pelayanan yang mencapai angka 87” selalu ada sesi pengisian kuisisioner untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap program tersebut. Namun sayangnya tidak ada rekapan data gabungan dari tiap-tiap tersebut untuk melihat rata-rata tingkat kepuasan masyarakat terhadap program BPBD dalam satu tahun kerja.

Tabel 2. Survey Kepuasan Masyarakat terhadap BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2022

No	Unsur Pelayanan	Nilai IKM	Mutu Pelayanan
1	Persayaratan	86,73	B
2	Prosedur	88,72	A
3	Waktu Pelayanan	89,16	A
4	Biaya/Tarif	100	A
5	Produk Layanan	87,39	B
6	Kompetensi Pelaksana	85,62	B
7	Perilaku Pelaksana	84,51	B
8	Penanganan Pengendalian saran dan masukan	77,43	B
	Sarana dan Prasarana	83,41	B
Rata-Rata Total		87	B (Baik)

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2024)

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai IKM BPBD adalah 87,00 dengan predikat pelayanan ‘B’ (Baik). Nilai rata-rata tertinggi adalah pada unsur biaya/tarif (100,00), sedangkan terendah adalah unsur pengaduan, saran, dan masukan (77,41). Predikat baik tersebut menurut Ridwan “Dalam urusan koordinasi terdapat permasalahan disaat terjadi kedaruratan. Permasalahan koordinasi internal lainnya adalah Ketika dalam berkoordinasi acapkali terjadi miss komunikasi dalam urusan pembagian tugas penanggulangan bencana, yang mana hal tersebut sejatinya merupakan tugas bersama bukan hanya peran BPBD semata” hal ini dikarenakan selama tahun 2022 BPBD berfokus pada upaya pemberdayaan masyarakat dengan secara aktif menyelenggarakan program pelatihan kebencanaan. Adapun sambungnya, dalam unsur pengaduan yang menjadi komponen penilaian terendah dikarenakan sering terjadi missskomunikasi internal dalam urusan kedaruratan.

Sejatinya memang penanggulangan bencana termasuk upaya pengurangan risikonya merupakan tanggung jawab seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun swasta. Selain BPBD, DPUTR merupakan OPD lainnya yang telah melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana selama tahun 2022. Menurut Hary, Staff Bidang Bangunan Gedung DPUTR Kabupaten Bandung, Kebijakan pengurangan risiko bencana banjir sejauh ini telah berusaha mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bandung sering melakukan konsultasi publik dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan (Labolo, 2014).

Meskipun Kabupaten Bandung belum sepenuhnya memiliki aturan spesifik mengenai pengurangan risiko banjir dari segi infrastruktur irigasi dan bangunan gedung, tetapi melalui peraturan yang ada seperti Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah

Nomor 16 Tahun 2021, serta merujuk pada RKPD Kabupaten Bandung, DPUTR menginvestasikan pengurangan risiko bencana ke dalam program pembangunannya dan berupaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya risiko bencana melalui proses sosialisasi. Salah satu sosialisasi yang dilakukan oleh DPUTR adalah sosialisasi PBG (Pedoman Bangunan Gedung) yang berisi standar-standar bangunan gedung di Kabupaten Bandung.

Namun sayangnya, menurut Hary “Memang masyarakat ada teknis ada pula non teknis, kewajiban kami hanya untuk terus menumbuhkan kesadaran melalui sosialisasi, selebihnya kami tidak dapat push lebih jauh. Di sisi lain memang bangunan gedung hunian cenderung tidak memiliki SLF karena masyarakat tidak memiliki urgensi ke sana. Adapun bagi mereka yang memiliki kepentingan dengan pihak bank, akan menyewa konsultan untuk pemenuhan kebutuhan SLF, selebihnya selama tidak mengganggu kepentingan umum seperti jalan raya dan objek vital lainnya, kami belum bisa push” maksudnya adalah partisipan pada setiap sosialisasi PBG utamanya adalah mereka yang memiliki kepentingan bisnis atau masyarakat yang memang paham urusan teknis infrastruktur gedung. Di luar itu, masyarakat umum tidak terlalu terlibat dalam kegiatan sosialisasi (Mujahidin, 2018).

Dalam urusan perencanaan daerah, Bappelitbangda tidak hanya berkoordinasi dengan OPD dan unsur pemerintahan lainnya, tetapi juga turut serta melibatkan masyarakat di dalam prosesnya. Musrenbang atau ‘Musyawarah Perencanaan Pembangunan’ merupakan forum untuk menyusun rencana pembangunan daerah. Bappelitbangda merupakan badan yang memprakarsai mesrenbangda di Kabupaten Bandung yang didasarkan pada Peraturan Bupati Bandun Nomor 126 Tahun 2021. Berbagai aspirasi masyarakat dalam musrenbang tersebut kemudian disusun ke dalam rancangan teknokratik untuk dibahas lebih lanjut oleh pemerintah dengan juga mengundang legislatif dan berbagai ahli untuk dikaji dan dianalisis lebih dalam (Mubarokah & Susanti, 2023).

Berbicara partisipasi dan dukungan masyarakat tentunya tidak lepas juga dari peran Kecamatan Dayeuhkolot sebagai koordinator wilayah. Menurut Hary, dalam melakukan sosialisasi seperti PBG sendiri DPUTR melibatkan unsur kecamatan sebagai jembatan penghubung antara DPUTR dan desa-desa yang dituju. Namun dalam kapasitasnya, Kecamatan Dayeuhkolot tidak mencanangkan program pengurangan risiko banjir. Oleh karena itu dalam komponen *authorizing envirointment* ini Kecamatan Dayeuhkolot hanya sebagai koordinator dan pengamat bagaimana program OPD terkait mengenai pengurangan risiko bencana banjir di jalankan. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, selain peran pemerintah tentunya terdapat pula peran NGO seperti FPRB dalam upaya edukasi dan sosialisasi pengurangan risiko bencana. Menurut Awen, Ketua FPRB Kabupaten Bandung, memang edukasi kebencanaan ini masih belum merata. Sehingga dari beberapa hasil yang didapatkan di lapangan dapat disimpulkan bahwasannya komponen *Authorizing Envirointment* terdapat beberapa efek yakni sebagai berikut:

Tabel 3. Komponen *Authorizing Envirointment* dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir

Komponen <i>Authorizing Envirointment</i> dalam pengurangan risiko bencana banjir		
BPBD Kabupaten Bandung	-	Melakukan program-program sosialisasi yang melibatkan masyarakat
	-	Dalam rangkaian program BPBD yang melibatkan masyarakat selalu terdapat sesi penilaian program dari masyarakat melalui form yang disebar
	-	Melalui survey kepuasan masyarakat tahun 2022 BPBD mendapat predikat baik (B)
	-	Hambatan BPBD adalah komunikasi internal dan eksternal saat terjadi kedaruratan

DPUTR Kabupaten Bandung	Melakukan sosialisasi pembangunan berlandaskan pengurangan risiko bencana dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021. - Bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkhusus pelaku usaha yang menjalankan usahanya di dalam bangunan gedung - Melalui sosialisasi tersebut masyarakat terdugasi tetapi masih banyak yang acuh karena tidak menyangkut urgensi mereka
Bappelitbangda Kabupaten Bandung	Menjalankan Perencanaan Pembangunan berlandaskan pengurangan risiko sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Bandung No 126 Tahun 2021. - Menyusun kegiatan Musrenbang tingkat Kabupaten - Menyusun Kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan - Masyarakat dinilai proaktif dalam mengikuti musrenbang dan pembahasan perencanaan pembangunan terstruktur karena musrenbang dilaksanakan dari tingkatan desa, kecamatan, hingga kabupaten
Pemerintah Kecamatan Dayeuhkolot	- Menjalankan arahan dari Pemerintah Kabupaten Bandung dan berkoordinasi dengan Desa dalam urusan kebencanaan - Membrosamai dan mendukung program OPD yang melibatkan masyarakat Desa - Sebagai koordinator antara OPD dan Desa - Memberikan dan menyalurkan bantuan saat dan pasca terjadinya bencana
Masyarakat	- Sosialisasi dan pendekatan komunitas dalam mengurangi bencana banjir masih belum optimal
FPRB Kabupaten Bandung	- Terdapat desa yang sudah dewasa dan siap dalam penerapan konsep pengurangan risiko bencana, tetapi lebih banyak desa yang masih belum siap dan masih butuh dorongan dari pihak pemerintah - Banyak desa yang masih melihat bencana dalam paradigma kedaruratan dan tidak melihat penanggulangan bencana dari upaya pengurangan risikonya.

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2024)

Berdasarkan bahasan dalam bagian ini dapat disimpulkan bahwa seluruh OPD yang menjadi objek penelitian ini, yakni BPBD, DPUTR, Bappelitbangda telah menjalankan program berbasis pengurangan risiko bencana. Kemudian dalam program-program yang dijalankan tersebut juga turut mengundang masyarakat dengan dibantu unsur kecamatan, untuk berpartisipasi dan proaktif dalam upaya pengurangan risiko bencana. Hanya saja dalam implikasinya, masih banyak masyarakat yang acuh dan belum melihat bencana dalam paradigma sebelum terjadinya bencana itu sendiri, sehingga upaya masyarakat dalam pengurangan risiko bencana masih belum optimal. Dalam pandangan Moore, tinggi rendahnya dukungan terhadap manajer publik berhubungan dengan legitimasi sebagai suatu bentuk budaya organisasi yang mana merupakan suatu bentuk aktifitas yang mampu menarik masyarakat dengan adanya suatu pengakuan yang sah terhadap kewenangan itu (Levi et al., 2009). Oleh karena itu, beberapa OPD tersebut perlu mengevaluasi bagaimana untuk meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat seperti merumuskan aturan yang lebih spesifik dalam urusan pengurangan risiko bencana atau meningkatkan dan menegaskan keterlibatan

masyarakat dalam program-program sosialisasi melalui aturan yang disusun sedemikian rupa (Muhammad, 2012).

Komponen terakhir dari segitiga strategis Mark Moore adalah “*Operational Capacity*”, yang mengukur kapasitas dan kapabilitas suatu organisasi publik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Todorut & Tselentis, 2015). Untuk menciptakan nilai publik pada organisasi publik, diperlukan kemampuan operasional dari organisasi tersebut yakni berupa sumber daya yang memadai dan didistribusikan secara benar, para pekerja yang cakap dan berpengalaman, saluran komunikasi yang jelas dan efektif, penerapan teknologi informasi yang baik dan inovatif, serta sumber keuangan yang jelas dan cukup untuk menjalankan suatu program atau kegiatan.

Pertama, menurut Ridwan secara umum BPBD Kabupaten Bandung selama tahun 2022 telah melaksanakan program-programnya sesuai dengan tujuan yang tercantum pada renja dan merujuk pada RKPD Kabupaten Bandung (Palau, 2022). Dari segi komunikasi BPBD secara proaktif menjadi koordinator penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung dengan konsep Pentahelix. Adapun permasalahan menurut Ridwan ialah Ketika dalam berkoordinasi acapkali terjadi missskomunikasi dalam urusan pembagian tugas penanggulangan bencana, yang mana hal tersebut sejatinya merupakan tugas bersama bukan hanya peran BPBD semata. Ada pula dalam upaya urusan kedaruratan, pihak non-pemerintahan terkadang berkontribusi tetapi tidak terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPBD. Padahal, meskipun dalam Perbub Nomor 81 tahun 2017, dijelaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab seluruh pihak, tetapi puncak koordinasi tetapi merupakan wewenang BPBD. Oleh karena itu upaya dan tindakan penanggulangan bencana haruslah dilakukan dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan BPBD. Kemudian selain permasalahan koordinasi, tidak dapat dimungkiri juga bahwa keterbatasan SDM baik secara kuantitas dan kualitas masih menjadi problematika bagi BPBD Kabupaten Bandung. Sebagai perbandingan BPBD Kota Cimahi pada tahun 2022 memiliki total 14 anggota (ASN) sementara BPBD Kabupaten Bandung hanya 27 anggota. Perbandingan tersebut tentunya cukup tipis mengingat jumlah kecamatan dan kelurahan Kota Cimahi, yang hanya berjumlah 3 kecamatan dan 15 kelurahan, sementara di Kabupaten Bandung terdapat 31 kecamatan dan 270 Desa (Ruhayat, 2024).

Kedua, menurut Hary, bidang Bangunan Gedung DPUTR Kabupaten Bandung menyatakan bahwa selama tahun 2022 tidak terdapat hambatan yang signifikan akibat kurangnya kebutuhan SDM terhadap jalannya program-program kerja DPUTR, berikut wawancara yang menerangkan hal tersebut “Mengenai hambatan mungkin tidak signifikan ya, lebih banyak pegawai mungkin lebih baik tetapi sejauh ini tidak begitu terhambat. DPUTR ketika menjalankan program sosialisasi PBG misalnya itu masih dapat dibantu oleh pihak kecamatan apabila kekurangan SDM”. Perihal koordinasi dan penggunaan teknologi juga terlihat dalam pembangunan embung tegalluar. Di mana DPUTR Kabupaten Bandung bekerjasama dengan DSDABM Kota Bandung dalam membangun Kolam Retensi Tegalluar, yang mana embung ini memang berlokasi di perbatasan antara Kabupaten dan Kota Bandung.

Ketiga, Menurut Deni Kepala Bidang Infrawil Bappelitbangda Kabupaten Bandung, dari segi komunikasi dan koordinasi Bappelitbangda dalam upaya pengurangan risiko bencana sudah berjalan cukup efektif karena sesuai dengan tupoksi Bappelitbangda itu sendiri yang bergerak di urusan perencanaan dan penelitian, sehingga sedikit banyaknya akan bersentuhan dengan berbagai OPD untuk membahas hasil temuan dan menyusun perencanaan strategis. Pendapat tersebut didasarkan pada hasil wawancara dengan Deni sebagai berikut “Utamanya dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana bekerjasama dengan FPRB dan berbagai komunitas penanggulangan bencana karena tidak dapat hanya bergantung pada OPD”. Upaya koordinasi juga dapat dilakukan Bappelitbangda dengan organisasi pemerintahan yang lebih tinggi seperti BBWS ketika ada suatu temuan mendesak yang berhubungan dengan pengelolaan Sungai Citarum sehingga perlu dilakukan tindakan cepat yang dapat dilakukan oleh Bappelitbangda atau OPD Kabupaten Bandung. Namun tentunya, proses tersebut dilakukan melalui prosedur formal dengan terlebih dahulu mengajukan surat rekomendasi dari OPD kepada BBWS.

Keempat, Kecamatan Dayeuhkolot melalui Pak Asep Kasi Pemerintahan menyatakan telah terbentuknya komunikasi efektif antara Kecamatan dan Pemkab Bandung serta masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir. Efektivitas komunikasi dan koordinasi tersebut didukung dengan adanya penggunaan teknologi seperti aplikasi *e-office*. *E-office* pada dasarnya merupakan aplikasi surat menyurat elektronik yang digunakan dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Bandung. Melalui *E-office* aktivitas surat menyurat antar instansi dapat lebih terkoordinasi dan terjaga kredibilitasnya dengan dilengkapi fitur tanda tangan elektronik yang dalam aplikasi. Dalam urusan pengurangan risiko bencana sendiri penggunaan *e-office* ini akan sangat membantu dalam menyebarkan edaran imbauan kesiapsiagaan dari BPBD kepada instansi lainnya seperti Kecamatan Dayeuhkolot untuk selanjutnya disebarkan lagi ke Desa dan lingkup RW/RT.

Kemudian, dari segi SDM yang tersedia sudah dapat menjalankan tugas administratifnya Kecamatan Dayeuhkolot tanpa terkendala, hanya saja dalam urusan kebencanaan baik dari upaya pengurangannya atau pun kedaruratannya masih perlu didukung oleh pihak-pihak non pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Pak Asep Kasi “Kekurangan sumber daya terutama limnas yang hanya berjumlah lima orang, tetapi disaat terjadinya bencana banyak pihak yang dapat dikerahkan seperti organisasi pencinta alam, satpol pp, bahkan dinas lain seperti PUTR dalam memberikan bantuan peralatan seperti ekskavator dan lainnya” Meskipun dirasa kurang dari segi SDM tetapi menurut Asep, tidak diperlukan anggaran tambahan untuk pengadaan aparatur karena bagaimana pun Kecamatan telah berada pada kapasitasnya, selebihnya dapat diatur oleh OPD terkait. Kemudian, dari segi SDM yang tersedia sudah dapat menjalankan tugas administratifnya Kecamatan Dayeuhkolot tanpa terkendala, hanya saja dalam urusan kebencanaan baik dari upaya pengurangannya atau pun kedaruratannya masih perlu didukung oleh pihak-pihak non pemerintah.

Kelima, menurut Awen Ketua FPRB Kabupaten Bandung menyatakan “Bagaimana pun kami non anggaran jadi apabila hendak melaksanakan sosialisasi, pembangunan Destana, serta semacam sekolah alam kesiapsiagaan bencana, maka yang kami lakukan adalah dengan mencari komunitas atau CSR swasta dan yayasan”, dari segi organisasi dan keanggotaan sudah tercukupi, tetapi terdapat keluhan di mana pada dasarnya FPRB merupakan mitra bagi BPBD sehingga fokus utamanya adalah untuk membantu dan memvalidasi apa yang BPBD persiapkan di dalam renjanya untuk kemudian secara bersama-sama di implementasikan seperti program-program sosialisasi dan Destana. Permasalahannya adalah, ketika FPRB melihat adanya sebuah keharusan bagi BPBD untuk bertindak seperti pembangunan Destana, tetapi BPBD belum dapat merealisasikannya maka FPRB perlu mencari dukungan dari komunitas atau lembaga non pemerintahan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya komponen *Operational Capacity* terdapat beberapa efek yakni sebagai berikut:

Tabel 4. Komponen *Operational Capacity* dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir

Komponen <i>Operational Capacity</i> dalam pengurangan risiko bencana banjir	
BPBD Kabupaten Bandung	Menjalankan tugas fungsi pokoknya dalam mengurangi risiko bencana sebagaimana yang diatur dalam Perbup No.35 Tahun 2022 dan menjadi koordinator dalam penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 - Upaya komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik meskipun terkadang ada missskomunikasi dalam kedaruratan - Dalam urusan kedaruratan terkadang beberapa pihak di luar BPBD tidak melakukan koordinasi ketika hendak memberi bantuan atau terlibat dalam penanganan bencana - Beberapa pihak pemerintah terkadang tidak menyadari bahwa penanggulangan bencana merupakan kewajiban setiap pihak

	- Jumlah aparat BPBD tidak lebih dari 10 anggota sehingga sangat kurang secara kuantitas - Terdapat pusdalops (pusat layanan dan operasi) dan penggunaan jaringan radio dalam menjalankan koordinasi dan komunikasi
DPUTR Kabupaten Bandung	- Komunikasi dan koordinasi terbangun antara DPUTR dengan pihak Kecamatan dalam menjalankan program sosialisasi PBG - Komunikasi dan koordinasi terbangun antara DPUTR dengan DBSPDM Kota Bandung dalam kerjasama pembangunan Kolam Retensi Tegalluar - Tidak ditemukan hambatan signifikan dari keterbatasan SDM di DPUTR
Bappelitbangda Kabupaten Bandung	Menjalankan Perencanaan Pembangunan berlandaskan pengurangan risiko sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Bandung No 126 Tahun 2021. - Melakukan koordinasi dengan OPD, Kecamatan, Desa, legislatif, dan masyarakat umum dalam kegiatan musrenbang - Menjalankan program Simpelbedas dan pengadaan AWLR untuk mikro DAS sebagai bentuk preventif terhadap bencana banjir - Dalam urusan SDM Bappelitbangda masih membutuhkan tenaga ahli di bidang lingkungan dan kebencanaan - Dari segi anggaran sudah mencukupi tetapi tidak menutup kemungkinan akan adanya tambahan anggaran untuk urusan dengan urgensi tinggi
Pemerintah Kecamatan Dayeuhkolot	- Koordinasi berjalan baik dengan bantuan dari aplikasi E-Office dan media sosial seperti Whatsapp Group - Kurangnya SDM sehingga jumlah Linmas yang dimiliki sangat sedikit (5 orang) - Dari segi anggaran tidak terdapat masalah
Masyarakat	- UKesadaran warga Desa Dayeuhkolot akan pentingnya pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya terbentuk - Terbentuk Banyaknya warga lansia yang tidak terjaring sosial media sehingga pendekatan seperti sosialisasi langsung masih diperlukan
FPRB Kabupaten Bandung	- Sejauh ini koordinasi dengan BPBD cukup baik dengan berupaya memfasilitasi dan membantu BPBD dalam menjalankan tupoksinya - Keterbatasan untuk mengambil inisiatif dikarenakan tidak memiliki anggaran tetap dari pemerintah

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2024)

Berdasarkan pembahasan pada bagian operational capacity ini, dapat disimpulkan bahwa BPBD, DPUTR, Bappelitbangda, dan Kecamatan Dayeuhkolot memiliki ketercukupan dan kekurangan masing-masing secara *operational capacity*. Secara umum seluruh OPD yang menjadi objek riset ini telah menjalankan komunikasi dan koordinasi baik dengan OPD Kabupaten Bandung lainnya, masyarakat, maupun organisasi publik lainnya dalam urusan pemerintahannya yang merujuk pada pengurangan risiko bencana banjir. Dalam implikasinya, beberapa OPD seperti BPBD dan Bappelitbangda masih terhambat oleh keterbatasan SDM yang tersedia, sehingga proses penyelenggaraan program masih belum optimal. Kemudian dari segi sumber daya lainnya seperti penggunaan teknologi dan anggaran, seluruh OPD yang menjadi objek riset ini dan Kecamatan Dayeuhkolot mengintegrasikan teknologi yang manfaatnya bermuara pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam pengurangan risiko bencana.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari segi *public value*, Pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan upaya normatif dalam mengurangi risiko bencana banjir dengan menerbitkan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Pembagian Kewenangan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung. Hanya, untuk urusan infrastruktur bangunan hunian, Perda yang berlaku masih belum tegas mengatur standar bangunan gedung hunian. Kemudian dari segi upaya preventif, beberapa OPD seperti BPBD, DPUTR, Bappelitbangda sudah menjalankan program yang mengusung konsep pengurangan risiko bencana, BPBD dengan sosialisasi kebencanaan dan Destana, DPUTR melakukan sosialisasi PBG dan Bappelitbangda bergerak dalam perencanaan dan pengadaan barang (AWLR). Namun, beberapa program seperti sosialisasi PBG masih belum optimal karena pelaksanaannya masih terbatas di beberapa wilayah di Kabupaten Bandung. Upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan secara terintegrasi, bersinergi, dan berkelanjutan, dimulai dari diterbitkannya regulasi yang diperlukan untuk melengkapi aturan yang berhubungan dengan pengurangan risiko bencana. Di sisi lain perlu juga adanya pedoman (rencana kontigensi) pengurangan risiko bencana secara spesifik terhadap tiap-tiap bencana itu sendiri bukan secara umum karena tiap bencana memiliki langkah mitigasi yang berbeda.

Dari segi *authorizing environment*, program-program berlandaskan pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan oleh beberapa OPD dalam riset ini telah terbukti melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. BPBD mengusung sosialisasi kebencanaan dan Destana, DPUTR menjalankan sosialisasi PBG, dan Bappelitbangda menyusun musrenbang di tingkat kecamatan dan kabupaten yang melibatkan masyarakat dan berbagai stakeholder lainnya. Kemudian pihak Kecamatan Dayeuhkolot melakukan pemberdayaan seperti pembentukan linmas sebagai *man power* dalam urusan penanggulangan bencana. Sayangnya, untuk sosialisasi yang bersifat pengurangan risiko bencana dan preventif, masyarakat cenderung acuh karena paradigma masyarakat terhadap bencana masih terbatas pada kedaruratan. Program-program dengan konsep pengurangan risiko bencana seperti sosialisasi kebencanaan perlu dilakukan secara berkesinambungan oleh BPBD dan OPD terkait dan melibatkan masyarakat secara luas. Kemudian melalui sosialisasi kebencanaan tersebut dibentuk forum-forum siaga bencana sebagai upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Apabila terdapat keterbatasan sumber daya manusia dalam lingkungan masyarakat setempat, maka forum tersebut dapat diintegrasikan dengan komunitas yang sudah ada seperti karang taruna atau LSM.

Dari segi *Operational Capacity*, dalam melaksanakan tupoksinya terutama yang menyangkut pengurangan risiko bencana, umumnya seluruh OPD yang menjadi objek riset ini melaksanakan fungsi koordinasi baik dengan masyarakat maupun *stakeholder* lainnya. Seperti DPUTR yang bekerjasama dengan DSDABM Kota Bandung dalam pembangunan kolam retensi guna mengurangi ketinggian banjir. Dalam proses koordinasi tersebut juga terdapat penggunaan teknologi oleh seluruh OPD di Kabupaten Bandung yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi seperti penggunaan *E-office*, media sosial seperti Whatsapp. Dalam keadaan darurat BPBD juga menggunakan siaran radio dalam berkoordinasi dan berkomunikasi. Selain itu, penggunaan teknologi juga peringatan dini seperti AWLR juga diterapkan oleh Bappelitbangda. Namun demikian, dari segi SDM terdapat OPD seperti BPBD, Bappelitbangda yang menyatakan kurangnya SDM internal dari segi kuantitas dan kualitas. Kurangnya SDM juga dikemukakan oleh pihak Kecamatan Dayeuhkolot dalam ketersediaan jumlah linmas. Kemudian perihal keterbatasan kapasitas dan kapabilitas OPD dapat diminimalisir dengan berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam upaya pengurangan risiko bencana. BPBD dan OPD terkait dapat menginisiasi penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan daerah rawan banjir melalui cctv atau pemantauan DAS melalui AWLR. Kemudian, dalam pengoperasiannya apabila terdapat keterbatasan SDM dapat memberdayakan masyarakat anggota forum/komunitas yang dibentuk seperti yang dijelaskan dalam poin sebelumnya, sebagai admin yang bertugas dalam memantau dan menyebarkan informasi yang didapat dari cctv dan AWLR melalui media-media kredibel

BPBD. Adapun, apabila keterbatasan berhubungan dengan anggaran maka BPBD dengan statusnya sebagai organisasi publik dapat bekerjasama dengan organisasi privat/swasta, baik dalam maupun luar negeri dalam pengadaan sistem peringatan dini atau pemberdayaan masyarakat, sebagaimana yang dilakukan oleh warga majalaya melalui komunitas Jaga Balai. Kerjasama pun dapat dilakukan dengan lembaga pemerintahan lainnya seperti bekerjasama dengan BPBD Jawa Barat dalam urusan pengurangan risiko bencana atau program pelatihan guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM BPBD Kabupaten Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.); 1st ed.). CV. Syakir Media Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>
- Asrofi, M. F., & Syaichoni, A. (2022). ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS KULINER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Waroeng Kampung AG One Tulungagung). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(11), 3157–3172. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawailmiah.v1i11.2905>
- Audiah, V. (2023). *10 Bencana Alam yang Sering Terjadi di Indonesia, Ribuan Korban Jiwa!* linilah.Com. <https://www.inilah.com/bencana-alam-yang-sering-terjadi-di-indonesia>
- Herdiana, I. (2022). *Salah Arah Pembangunan akan Menuai Bencana di Bandung Selatan*. Bandungbergerak.Id. <https://bandungbergerak.id/article/detail/2655/salah-arah-pembangunan-akan-menuai-bencana-di-bandung-selatan>
- Isnanto, B. A. (2023). *13 Penyebab Banjir: Faktor Alam hingga Ulah Manusia*. Detik.Com. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6710273/13-penyebab-banjir-faktor-alam-hingga-ulah-manusia>
- Kaho, J. R. (2010). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Karniawati, N. (2015). HAKEKAT ILMU PEMERINTAHAN (Kajian Secara Filsafat). *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 205–215. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11833>
- Karunasena, K., Deng, H., & Singh, M. (2011). Measuring the public value of e-government: a case study from Sri Lanka. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 5(1), 81–99. <https://doi.org/10.1108/17506161111114671>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (F. Annisya (ed.)). Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Labolo, M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan (Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya)*. Rajawali Pers.
- Laida, S. S. E., Burhanudin, H., & Hendrakusumah, E. (2023). Efektivitas Pembangunan Kolam Retensi Pengendalian Banjir di Kelurahan Andir. *Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning*, 3(2), 418–425. <https://doi.org/10.29313/bcsurp.v3i2.8448>
- Levi, M., Sacks, A., & Tyler, T. (2009). Conceptualizing Legitimacy, Measuring Legitimizing Beliefs. *American Behavioral Scientist*, 53(3). <https://doi.org/10.1177/0002764209338797>
- Marlyono, S. G. (2016). Peranan Literasi Informasi Bencana terhadap Kesiapsiagaan Bencana Masyarakat Jawa Barat. *Jurnal Geografi Gea*, 16(2), 116–123. <https://doi.org/10.17509/gea.v16i2.4491>
- Moore, M. H. (1995). *Creating Public Value: Strategic Management in Government* (1st ed.). Harvard University Press.
- Mubarokah, M. E., & Aditya, I. K. W. (2022). *Banjir di Kabupaten Bandung, Warga Keluhkan Sampah Menumpuk di Aliran Sungai Cisangkuy*. Kompas.Com. <https://bandung.kompas.com/read/2022/03/16/071903078/banjir-di-kabupaten-bandung-warga-keluhkan-sampah-menumpuk-di-aliran-sungai?page=all>
- Mubarokah, M. E., & Susanti, R. (2023). *Sehari Diguyur Hujan, 7 Kecamatan di Kabupaten Bandung Terendam Banjir*. Kompas.Com. <https://bandung.kompas.com/read/2023/12/01/151035578/sehari-diguyur-hujan-7->

- kecamatan-di-kabupaten-bandung-terendam-banjir?page=all
- Muhammad, S. (2012). *Strategi Pemerintahan : Manajemen Organisasi Publik*. Erlangga.
- Mujahidin, M. (2018). *Hadapi Musim Penghujan, BPBD Kabupaten Bandung Akui Kekurangan Anggota*. Jabar.Tribunnews.Com. <https://jabar.tribunnews.com/2018/10/15/hadapi-musim-penghujan-bpbd-kabupaten-bandung-akui-kekurangan-anggota>
- Mustajab, R. (2022). *Indonesia Masuk Daftar Negara Paling Rawan Bencana pada 2021*. Dataindonesia.Id. <https://dataindonesia.id/varia/detail/indonesia-masuk-daftar-negara-paling-rawan-bencana-pada-2021>
- Palau, E. La. (2022). *Banjir Berulang di Kabupaten Bandung*. Bandungbergerak.Id. <https://bandungbergerak.id/article/detail/14622/banjir-berulang-di-kabupaten-bandung>
- Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *Supremasi Hukum*, 19(1), 1–15. <https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>
- Ruhayat, A. (2024). *Dibangun Jokowi Rp 141 Miliar, Kolam Retensi untuk Atasi Banjir di Jawa Barat Ini Masih Belum Efektif*. Ayobandung.Com. <https://www.ayobandung.com/bandung-raya/7912099130/dibangun-jokowi-rp-141-miliar-kolam-retensi-untuk-atasi-banjir-di-jawa-barat-ini-masih-belum-efektif>
- Rusfiana, Y., & Lestari, M. N. (2021). STRATEGI ANTISIPASI POTENSI BENCANA ALAM DI KABUPATEN BANDUNG. *Jurnal Konstituen*, 3(1), 31–39. <https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/view/2385>
- Salam, D. S. (2007). *Manajemen Pemerintahan Indonesia* (4th ed.). Djambatan.
- Salusu, J. (1996). *Pengambilan Keputusan Stratejik (untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit)*. Grasindo.
- Setiadarma, L. (2024). *Memudahkan Investasi, Tahun Depan Ditargetkan Semua Kecamatan di Kabupaten Bandung Punya RDTR*. Wartaparahyangan.Com. <https://wartaparahyangan.com/memudahkan-investasi-tahun-depan-ditargetkan-semua-kecamatan-di-kabupaten-bandung-punya-rdtr/>
- Sitorus, I. H. O., Bioresita, F., & Hayati, N. (2021). Analisa Tingkat Rawan Banjir di Daerah Kabupaten Bandung Menggunakan Metode Pembobotan dan Scoring. *Jurnal Teknik ITS*, 10(1), 14–19. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v10i1.60082>
- Sugriwa, I. A. (2022). *Dukung Ketahanan Bencana dan Lingkungan, Pemkab Bandung Launching Inovasi Simpelbedas*. Jabar.Times.Co.Id. <https://jabar.times.co.id/news/berita/dndtdj8yh7/Dukung-Ketahanan-Bencana-dan-Lingkungan-Pemkab-Bandung-Launching-Inovasi-Simpelbedas>
- Sumarna, A. (2010). *Sejarah Kabupaten Bandung*. Ciburial.Desa.Id. <https://ciburial.desa.id/sejarah-kabupaten-bandung/>
- Todorut, A. V., & Tselentis, V. (2015). DESIGNING THE MODEL OF PUBLIC VALUE MANAGEMENT. *Proceedings of the 9th INTERNATIONAL MANAGEMENT CONFERENCE*, 9(1), 74–80. <https://econpapers.repec.org/RePEc:rom:mancon:v:9:y:2015:i:1:p:74-80>
- Tuharyati, Y., Jannah, A. D., & Triagustin, S. A. (2023). Bencana Banjir: Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang Pasca berlakunya UU Cipta Kerja. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(1), 39–49. <https://doi.org/doi.org/10.47134/pssh.v1i1.11>